

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menteri Keuangan meresmikan operasionalisasi P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) atau *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF), sebuah institusi penting yang dirancang untuk mendukung pengembangan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) infrastruktur di Indonesia. Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menkumham pada 27 Januari 2010 tersebut telah siap beroperasi penuh untuk menyediakan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang telah diamandemen dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) merupakan *Guarantee Fund*. *Guarantee Fund* perlu dibentuk karena pembangunan proyek infrastruktur Indonesia memerlukan modal yang besar (Antara News.com, 12 Mei 2010).

Selanjutnya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dan diharapkan akan meningkatkan dan mempercepat pembangunan di Indonesia.

Pada praktiknya, suatu proyek konstruksi mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya dan juga peralatan. Hal ini membutuhkan suatu manajemen proyek yang bagus mulai dari tahap pengerjaan awal

sampai tahap penyelesaian proyek. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas proyek dan semakin langkanya sumber daya maka dibutuhkan juga peningkatan sistem pengelolaan yang baik dan terintegritas (Ahuja et al., 1994).

Perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu proyek dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang signifikan mengindikasikan pengelolaan proyek yang buruk. Indikator prestasi proyek dari segi biaya dan waktu ini memungkinkan tindakan pencegahan agar pelaksanaan proyek berhasil dan berjalan sesuai dengan rencana (Unggul Prasetyo Nugroho, 2010).

Pihak penyedia jasa konstruksi harus dapat menyikapi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan melalui P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sehingga diharapkan akan meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimanakah skema penjaminan dana infrastruktur dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)?
2. bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak – pihak pemangku kepentingan utama jasa konstruksi dalam menyikapinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana skema penjaminan dana infrastruktur dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
2. untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak – pihak pemangku kepentingan utama jasa konstruksi dalam menyikapinya.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat terarah dengan baik sesuai tujuan penelitian serta dengan adanya keterbatasan waktu pengerjaan maka perlu adanya batasan penelitian. Batasan penelitian ini adalah :

1. penelitian dilakukan terbatas pada lingkup P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) serta pada pada pihak – pihak pemangku kepentingan utama yang akan melakukan kerjasama dengan P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk mendapatkan penjaminan
2. data yang digunakan berupa data dokumen, informasi serta wawancara yang didapatkan dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) serta dari pihak – pihak pemangku kepentingan lainnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai penambahan ilmu dalam disiplin manajemen konstruksi teknik sipil untuk mempelajari, mempergunakan dan memanfaatkan penjaminan infrastruktur terhadap pelaksanaan proyek konstruksi, yang mana pada akhirnya diharapkan terjadinya percepatan serta peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1.6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan pengecekan yang telah dilakukan penulis, judul tugas akhir Studi Skema Penjaminan Dana Infrastruktur Pada Proyek Konstruksi belum pernah digunakan.